

## ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diturunkan melalui UU No. 2 Tahun 2002. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait angkutan jalan di Kota Cimahi menurut UU No. 22 Tahun 2009. Lalu lintas di jalan raya menjadi masalah yang sering ditemukan sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya pengguna lalu lintas yang sering melanggar ketertiban dalam berkendara serta jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Adaanya data yang didapatkan menjadi konsentrasi perlunya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelanggar lalu lintas. Rangkaian pelanggaran yang dilakukan dalam berkendara menjadi bagian tidak lepas dari kurangnya penegakan dan peran polisi lalu lintas terhadap pengaturan lalu lintas. Uraian permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rekayasa lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Cimahi, dan pendidikan lalu lintas di Kota Cimahi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Digunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi pustaka dan data yang didapatkan langsung dari lapangan berdasarkan narasumber sebagai data pendukung, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pembentukan Satlantas di Kota Cimahi memiliki tugas dalam melakukan manajemen terhadap lalu lintas melalui rekayasa lalu lintas berupa *contra flow* dan pengalihan jalan karena tingkat kepadatan penduduk dan kepadatan kendaraan menciptakan kemacetan yang berlebih. Satlantas Kota Cimahi melakukan tugas untuk menciptakan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dengan menggunakan penegakan hukum yang terdiri *Pre-Emtif*, *Preventif*, dan *Represif*. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Kota Cimahi melakukan pendidikan lalu lintas dengan berdasarkan target disesuaikan dengan rentang usia dan jenis pendidikannya.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat saran dalam penelitian ini meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memberikan perangkat lunak yang akan mendukung dalam manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas, Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa pemberian skor yang mampu menyulitkan dalam pembuatan SIM, dan bentuk pendidikan lalu lintas dapat dilakukan terus menerus melalui pemberian speaker di simpang jalan untuk mengingatkan masyarakat tertib lalu lintas.

**Kata Kunci :** Satlantas, Penegakan, Pendidikan